

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG
TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR
(Studi Kasus: di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2022

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG

TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR

(Studi Kasus : di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)

(Febrian Akhirama Saputra, 1920112039, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 111 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Pangan olahan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang di konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan olahan, bahan baku pangan olahan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman, demi menjaga keamanan pangan olahan disinilah dibutuhkan peran pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan disebabkan budaya hukum masyarakat yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab tingginya peredaran pangan olahan tanpa izin edar, selain itu juga dipengaruhi lemahnya substansi dan struktur hukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar dan apa saja kendala serta hambatan. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan terkait objek penelitian yang kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di tengah masyarakat, BBPOM masih sering menemukan pangan olahan tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar pangan olahan. Dalam melakukan penegakan hukum, BBPOM telah memiliki beberapa mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Nyatanya penyidikan dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM belum menjamin kepastian hukum, karena peraturan yang ada tidak ditaati serta kendala yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber daya manusia dan lemahnya kewenangan BBPOM dalam menindak pangan olahan tanpa izin edar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, PPNS, Pangan Olahan, BBPOM

**LAW ENFORCEMENT BY CIVIL SERVANT INVESTORS (PPNS) CENTER
FOR DRUG AND FOOD SUPERVISORY CENTER (BBPOM) PADANG ON
THE CIRCULATION OF PROCESSED FOOD WITHOUT A CIRCULATION
LICENSE (Case Study: in the Legal Area of BBPOM, Padang)**

(Febrian Akhirama Saputra, 1920112039, Post-Graduate Program of Law Faculty Andalas

University, 111 Pages, 2022)

ABSTRACT

Processed food is everything that originates from agricultural, plantation, forestry, fishery, water and water products, either processed or not processed, which are intended as food or drink for human consumption, including processed food additives, processed food raw materials, and processed food ingredients. other products that are used in the process of preparing, processing and/or making food or drink, in order to maintain the safety of processed food, this is where the role of the government through the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is needed to oversee drug and food distribution. The ineffectiveness of supervision and law enforcement on the distribution of drugs and food is due to the poor legal culture of society which is one of the factors causing the high circulation of processed food without a distribution permit, besides that it is also influenced by the weakness of substance and legal structure. Efforts to tackle crime with criminal law are essentially part of law enforcement efforts. The issue raised in this study is how is law enforcement by Civil Servant Investigators (PPNS) Padang Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) against the circulation of processed food without a distribution permit and what are the obstacles and obstacles. The research used is a sociological juridical approach which is analytically descriptive in nature, namely analyzing the link between applicable laws and regulations and legal theories and implementation practices related to the research object which then produces several conclusions. In carrying out surveillance of processed food circulating in the community, BBPOM still often finds processed food without a distribution permit that does not meet processed food standards. In carrying out law enforcement, BBPOM already has several mechanisms in accordance with statutory regulations where these rules have a juridical aspect that can guarantee certainty that the law functions as a rule that must be obeyed. In fact, the investigation and supervision carried out by BBPOM has not guaranteed legal certainty, because existing regulations are not adhered to and the constraints faced are the lack of availability of human resources and the weak authority of BBPOM in taking action against processed food without a distribution permit.

Keywords: Law Enforcement, PPNS, Processed Food, BBPOM